



Strategi Pendanaan Masyarakat dalam Pengelolaan PKBM di Kalimantan Barat

Ummu Latifa Az Zahra^{1*}, Entoh Tohani²

^{1,2}Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Jalan Colombo Nomor 1, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282

Email: Ummulatifa.2021@student.uny.ac.id

Received: 18 January 2024; Revised: 14 February 2024; Accepted: 18 March 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menggambarkan: 1) permasalahan pendanaan, 2) pengelolaan pendanaan masyarakat, dan 3) strategi pengelolaan pendanaan masyarakat hingga *survive* pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Barat yaitu: PKBM Gemilang, PKBM Bubor Paddas, dan PKBM Prokindo. Informan pada penelitian ini adalah ketua PKBM, pengelola PKBM dan masyarakat yang terlibat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dan uji *dependability*. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini melalui pengumpulan data, kondensasi, penyajian data per kasus, dan pada tahap terakhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Permasalahan pendanaan masyarakat sebelumnya sangat beragam yaitu terbatasnya dana pemerintah, perubahan kebijakan, pergantian kepemimpinan, hubungan yang kurang baik dengan pemerintah serta sulitnya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Upaya yang dilakukan adalah yaitu: mengupayakan dana luar, pengelola memberikan dana hibah, melakukan upaya inovatif serta membangun usaha bersama masyarakat, 2) pengelolaan pendanaan masyarakat pada PKBM Kalimantan Barat telah berjalan. Namun pada prioritas penerima dan pelaksanaan penerimaan dana masyarakat belum optimal. Adanya pengelolaan pengembangan pendanaan masyarakat juga telah memberikan manfaat baik dibidang sosial, ekonomi dan pendidikan. 3) strategi pengelolaan pendanaan masyarakat hingga *survive* pada PKBM Kalimantan Barat telah berjalan namun belum optimal. Strategi ini meliputi: pengembangan partisipasi masyarakat, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kerja sama dan kemitraan, *special event*.

Kata Kunci: pusat kegiatan belajar masyarakat, partisipasi masyarakat, pendanaan, pengembangan, pengelolaan

Community Funding Strategies in the Management of Community Learning Centers (PKBM) in West Kalimantan

Abstract

This study aims to describe: (1) funding-related issues, (2) the management of community funding, and (3) strategies for managing community funding to ensure the sustainability of Community Learning Centers (PKBM) in West Kalimantan. The study uses a qualitative approach with a case study research design. The research was conducted in West Kalimantan, specifically at PKBM Gemilang, PKBM Bubor Paddas, and PKBM Prokindo. The informants in this study included the heads of the PKBM, PKBM managers, and community members involved in the centers. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. To ensure data validity, credibility and dependability tests were employed. Data analysis involved data collection, data condensation, case-by-case data presentation, and drawing conclusions as the final stage. The findings of this study show that: (1) Previous issues related to community funding were diverse, including limited government funding, policy changes, leadership transitions, poor relations with the

government, and complex administrative requirements. Efforts made to address these challenges included seeking external funding, managers providing grant funds, implementing innovative initiatives, and establishing joint ventures with the community. (2) Community funding management in West Kalimantan PKBM has been implemented, although prioritization of recipients and the execution of community fund disbursement remain suboptimal. Nevertheless, the development of community funding has provided social, economic, and educational benefits. (3) Strategies for managing community funding to maintain the sustainability of PKBM in West Kalimantan are in place but have yet to reach optimal effectiveness. These strategies include enhancing community participation, developing information and communication technology (ICT), building partnerships and collaborations, and organizing special events.

Keywords: community learning center, community participation, funding, development, management

How to Cite: Az Zahra. & Tohani, Entoh. (2024). *Strategi Pendanaan Masyarakat dalam Pengelolaan PKBM di Kalimantan Barat*. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. 8(1).67-85. doi: <https://doi.org/10.21831/diklus.v8i1.84024>



PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan menjadi komponen yang esensial dan tidak terpisahkan dalam proses penyelenggaraan belajar dan mengajar (W. P, 2013). *Education costs are one of the instrumental input components that are very important in implementing education (Tasrif et al., 2023)*. Pembiayaan pendidikan memiliki peran yang menentukan pencapaian tujuan pendidikan baik yang bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif (Mulyono, 2010) Jika tidak ada pembiayaan pendidikan, maka proses penyelenggaraan belajar mengajar akan terhambat.

Pembiayaan pendidikan berkaitan dengan dana yang digunakan dan diperlukan untuk mendukung segala aktivitas, kegiatan, program dan kebutuhan dari Pendidikan. Pembiayaan pendidikan juga berhubungan dengan total dana yang dikeluarkan baik oleh keluarga yang menyekolahkan, individu (peserta didik), warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintah guna mendukung kelancaran proses pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun nonformal (Suhardan & Ridwan, 2014). Semakin efisien dana yang digunakan dalam sistem pendidikan, maka semakin berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan (Mulyono, 2010).

Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak penyelenggara

pendidikan baik masyarakat, maupun pemerintah. Setiap tahun pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana untuk pendidikan. Pemerintah menetapkan 20% dari APBN. Pada tahun 2021 jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan berjumlah Rp. 550 triliun, pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu Rp. 541,7 triliun. Namun pada tahun 2023 alokasi dana untuk pendidikan mengalami kenaikan yaitu Rp. 608,2 triliun. Alokasi dana tersebut akan masuk kepada kementerian pendidikan, riset dan teknologi. Alokasi dana meliputi: bantuan bidikmisi/KIP kuliah, Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar, beasiswa LPSP, tunjangan guru non-PNS, program-program Merdeka Belajar, termasuk pada pembiayaan pendidikan nonformal.

Pemerintah telah berupaya mengatur pembiayaan dalam pendidikan nonformal yaitu pada pendidikan kesetaraan. Untuk membantu pembiayaan penyelenggara pendidikan kesetaraan pemerintah memberikan penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOP) (Nurkholis & Cahyono, 2022). Dana BOP ini yang akan dialokasikan dalam menyediakan pendanaan operasional non personalia yang bertujuan untuk mendukung kegiatan penyelenggara Pendidikan kesetaraan terutama proses pembelajaran baik paket A, B ataupun paket C.

Saat ini satuan biaya dana bantuan operasional telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No. 27/PP Tahun 2022. Jumlah bantuan dana yang diterima oleh lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan disesuaikan dengan jenjang, bantuan biaya dihitung berdasarkan jumlah per peserta didik untuk paket A sebesar Rp. 1.300.000, paket B sebesar Rp. 1.500.000 dan paket C berjumlah 1.800.000 (Kemendikbud). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pada tahun 2022 alokasi dana BOP kesetaraan mencapai 1,02 triliun rupiah yang akan diberikan kepada 587 ribu peserta didik melalui kantor pelayanan penyelenggaraan perbendaharaan keuangan.

Saat ini perkembangan jumlah lembaga penyelenggara kesetaraan yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah PKBM di Indonesia. Berdasarkan Dapodik pada tahun 2021 jumlah PKBM seluruhnya di Indonesia adalah berjumlah sekitar 86.029. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan semakin meningkat sehingga PKBM memiliki peluang besar dan posisi strategis di dunia pendidikan nonformal.

PKBM merupakan suatu tempat kegiatan pembelajaran masyarakat sekaligus mitra kerja pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bersama masyarakat melalui program-program pendidikan nonformal yang diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar, hingga dapat meningkatkan kemandirian, inovatif, dan keberdayadidikan dalam mencari berbagai informasi baru guna meningkatkan kehidupannya (Kamil, 2011). Berdirinya PKBM bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat atau anak yang mengalami putus sekolah baik disebabkan karena keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai latar belakang yang lain. Keberhasilan dari PKBM untuk mencapai tujuan sangat bergantung dari bagaimana pengelolaan PKBM yang ada di dalamnya. Salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan PKBM bagaimana kemampuan PKBM dalam menciptakan sistem pengelolaan yang transparan efektif, bertanggung jawab (Tohani, 2010a) serta dibutuhkan kemampuan

manajemen pengelolaan PKBM yang baik (Suharta, 2003).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pengelolaan PKBM salah satunya adalah sumber dana. Sumber dana di PKBM menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan PKBM. Jika tidak ada sumber dana maka lembaga tidak mungkin bisa berdiri dan bertahan. PKBM membutuhkan dana untuk mendukung fasilitasi SDM, sumber daya mineral, ataupun sumber daya teknologi yang memadai agar bisa berkontribusi terutama dalam pencapaian eksistensi dan mutu dari program penyelenggaraan PKBM (Nopiyanti 2021). Banyak lembaga pendidikan yang menggantungkan diri terhadap sumber dana (T. Hermawan et al., 2017). Jika sumber dana tercukupi dengan baik maka akan membantu dan menjaga program-program di PKBM agar tetap berjalan dan berkembang dengan maksimal

Namun saat ini ketergantungan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap dana-dana dari pemerintah masih sangat tinggi (Tohani, 2010b). Keterbatasan dana (PRATIWI, 2022) dan ketergantungan dengan dana pemerintah (Siregar & Panggabean, 2021) menjadi kendala penyelenggaraan program di PKBM. Ketergantungan dengan dana pemerintah ini dapat membuat PKBM sulit maju dan berkembang. Jika PKBM ataupun lembaga pendidikan nonformal selalu bergantung dengan dana pemerintah maka ketika tidak ada dana bantuan dari pemerintah dapat menyebabkan program tidak berjalan bahkan akan berhenti. Minimnya dukungan pendanaan juga dapat penghambat penyelenggaraan PKBM sehingga tidak dapat berjalan maksimal (Rizka & Hardiansyah, 2017). Sebaiknya Lembaga PKBM memiliki sumber dana lain untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan dan program agar tidak ketergantungan dengan dana pemerintah.

Dana bantuan yang diberikan pemerintah terbatas dan belum mampu memenuhi banyaknya kebutuhan di PKBM. Hal ini disebabkan beberapa alasan yakni penggunaan dana harus sesuai dengan program pemerintah, banyaknya

persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, jumlah penerima yang terbatas, tidak ada jaminan untuk tetap mendapatkan bantuan ditahun depan. Dukungan tidak bergaransi atau berkelanjutan bersama pemerintah juga dapat menjadi kendala penyelenggaraan program di PKBM (Rizka & Hardiansyah, 2017). Kendala lainnya yakni proses pengalokasian dana bantuan, proses pengalokasian ini memiliki 2 tahap dalam alokasi satu tahun, yaitu pada tahap pertama 50% paling cepat bulan Februari dan tahap kedua 50% paling cepat bulan Juli. Artinya dalam masa penyaluran terdapat jeda pencairan dana. Hal ini juga dijelaskan (Menteri keuangan, 2021) bahwa terdapat jeda pencairan dana disebabkan karena perbedaan penyaluran sesuai dengan beban salurnya. Jeda ini akhirnya akan menyebabkan terjadinya keterlambatan dana. Sementara keterlambatan dana juga akan menyebabkan satuan pendidikan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan (Nurkholis & Cahyono, 2022).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan PKBM untuk mengatasi keterbatasan dan ketergantungan dana pemerintah adalah melalui upaya pengembangan pendanaan. Upaya pengembangan dilakukan agar PKBM mampu beradaptasi atau mengantisipasi berbagai perubahan-perubahan yang ditimbulkan guna mengatasi permasalahan tentangan, atau kendala sekaligus memberikan peluang yang dapat dilakukan demi keberlangsungan dari PKBM ((Tohani, 2010c). Pengembangan dilakukan bukan hanya dapat menambah sumber masukan atau membuat PKBM mandiri secara ekonomi, namun pengembangan juga dapat bermanfaat untuk membangun citra yang baik dimasyarakat (Puspito et al., 2021). Pengembangan dana sangat penting untuk dilakukan guna mempertahankan sumber dana yang dimiliki PKBM, menjamin keberlangsungan program dari PKBM, memperbaiki kualitas pendidikan, mengurangi beban pendidikan serta dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

Pengembangan dana dilakukan untuk menghasilkan sumber dana tidak hanya dari dana pemerintah, namun juga memaksimalkan sumber-sumber pendanaan masyarakat yang lain seperti melalui swadaya, kerja sama

dengan lembaga lain, membuka unit usaha mandiri, mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan sebagai pemasukan, dana CSR dan bahkan bisa melalui dana pinjaman dari bank. Dana swadaya juga dapat berupa dana sumbangan pribadi, sumbangan dari wali peserta didik, sumbangan warga/tokoh, dan sebagainya. Peningkatan pendanaan pada kegiatan pendidikan nonformal juga dapat dilakukan dengan penggalangan dana melalui media sosial (Ekadharna et al., 2017). Selain itu kerja sama dan mitra baik komponen masyarakat maupun lembaga luar, dapat dilakukan PKBM untuk mendapat keuntungan secara finansial material atau secara sosial (Kamil, 2011). Pola kerja sama meliputi kemitraan antara pemerintah, swasta, *craft* usaha rakyat (KUR) dan mandiri pariwisata (Latuconsina et al., 2019). Kemitraan ini dapat menjadi jalan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan dana (Ibrahim et al., 2020).

Selama ini PKBM akan berkembang jika mendapatkan bantuan BOP atau bantuan dana pemerintah dan lembaga PKBM belum mampu melakukan pemanfaatan terhadap sumber dana yang lain (Nopiyanti 2021). Namun PKBM Al-Huda mampu melaksanakan proses pembelajaran program tidak tergantung dengan dana bantuan dari pemerintah (T. Hermawan et al., 2017). Sebagian besar sumber dana yang masuk ke-PKBM Al Huda justru bersumber dari swadaya masyarakat dan usaha kerupuk gendar yang dimiliki oleh lembaga. Sehingga keberlangsungan program-program sebenarnya bisa dilakukan melalui pemasukan sumber dana dari swadaya dan usaha. Selain itu kondisi ini juga terjadi pada PKBM Budi Utama di Surabaya yang telah berdiri selama 13 tahun. PKBM Budi Utama tidak selalu bergantung pada dana pemerintah, PKBM ini berhasil membangun kerja sama dan memiliki program *life skills* kuliner (Hidayah & Nusantara, 2020). PKBM budi Utama melakukan pengembangan potensi sumber daya manusia lokal yakni yang mendirikan *cafe* yang dikelola dengan melibatkan masyarakat dan peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber dana PKBM bisa didapat dengan berbagai cara, sehingga PKBM perlu melakukan pengembangan dengan memaksimalkan

potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan PKBM didaerahnya.

Pengembangan lainnya juga terjadi pada PKBM Ceria yakni strategi pengembangan dana yang dilakukan yakni melalui strategi *fundraising* (penggalangan dana) yang di dalamnya menggunakan strategi edukasi publik, strategi layanan donasi maupun strategi berkompetisi ke instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. PKBM Ceria telah menunjukkan kemampuan untuk dapat menggali sumber pendanaan yang berasal dari para donator (finansial maupun non finansial), edukasi publik juga dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bagaimana bersikap pada penyelenggara program pendidikan dan PKBM ceria juga mengupayakan dana pemerintah melalui kompetisi dan pengajuan proposal bantuan dana sosial baik pada pemerintah pusat maupun daerah (Rizka & Hardiansyah, 2017). Selain itu strategi *fundraising* ini juga dilakukan oleh salah satu lembaga nonformal yakni pada TPQ At Toyyibah Desa Plana Somagede Banyumas. Pada TPQ tersebut melibatkan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bukan hanya ruang lingkup lembaga, namun masyarakat secara umum maupun donatur. Pengajuan permohonan dana dilakukan dengan pengajuan proposal, menjalin hubungan dengan masyarakat, kepala dusun maupun pengurus masjid. Selain itu TPQ juga menerapkan sistem syahriah, mengadakan program kontak infak, menjalin hubungan dengan donatur tetap, mengolah tanah garapan serta mengadakan perkumpulan alumni.

Pengembangan pendanaan masyarakat juga terjadi pada PKBM di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa terdapat PKBM di Kalimantan Barat yang saat ini masih eksis dalam penyenggaraan program PNF serta memiliki usaha bisnis yang menyokong pembiayaan lembaga. PKBM yang memiliki pengembangan pendanaan ini yakni pada PKBM Gemilang, Prokindo dan Bubor Paddas. Ketiga PKBM tersebut merupakan PKBM yang memiliki usaha bisnis yakni pada PKBM Gemilang memiliki usaha bisnis hidroponik dan usaha kripik (KUM) yang dikelola oleh PKBM

dan masyarakat, selanjutnya PKBM Prokindo memiliki usaha warung makan cobek bakar dan aktivitas pemberdayaan yang dikelola warga belajar dan pengelola PKBM. Selanjutnya PKBM Bubor Paddas memiliki konveksi jahit yang dikelola oleh masyarakat dan pengelola PKBM.

Saat ini penelitian tentang pengembangan dana masyarakat di PKBM Kalimantan Barat masih jarang. Padahal daerah ini memiliki potensi besar dalam upaya pengembangan program-program baik pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan, maupun industri kreatif lainnya. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana pengelolaan dan strategi pengembangan dana masyarakat di PKBM Kalimantan Barat. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti agar dapat mengetahui bagaimana permasalahan pendanaan yang terjadi pada PKBM Kalimantan Barat, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendanaan pada PKBM Kalimantan Barat, bagaimana pengelolaan pendanaan masyarakat pada PKBM Kalimantan Barat dan strategi pengembangan pendanaan masyarakat pada PKBM Kalimantan Barat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti pendekatan studi kasus karna ingin menyelidiki lebih cermat dan mengumpulkan informasi lengkap bagaimana kinerja pengembangan pendanaan masyarakat di PKBM. Studi kasus merupakan penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut (Syahza, 2021). Pendekatan studi kasus bersifat *multiple case study*. Penelitian ini melibatkan 3 kasus pada lokasi di PKBM yang berbeda yakni di Kalimantan Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena ketiga PKBM tersebut memiliki potensi dalam upaya pengembangan pendanaan masyarakat yakni baik pada sektor perdagangan, pertanian, maupun industri. Selain itu pada PKBM tersebut juga memiliki unit usaha yang berkembang yang mendukung

pengembangan pendanaan masyarakat di PKBM. Usaha tersebut meliputi Usaha bisnis hidroponik dan kripik, usaha warung makan, serta memiliki usaha konveksi jahit. Penelitian ini dilakukan PKBM Gemilang, PKBM Prokindo, dan PKBM Bubor Paddas. Informan yang diwawancarai pada tiap PKBM meliputi: ketua PKBM, pengelola PKBM, serta masyarakat yang terlibat. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan Data dilakukan mulai hingga Mei 2023 hingga Oktober 2023.

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Bentuk instrumen atau pedoman yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Proses wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Proses secara berlangsung sekitar 2 jam dalam setiap pertemuan di lokasi PKBM dan kegiatan pendanaan sementara proses secara tidak langsung melalui *videocall* karena keterbatasan lokasi yang berlangsung sekitar 2 jam dalam setiap pertemuan. Jumlah total keseluruhan informan yang diwawancarai berjumlah 9 informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik. Uji keabsahan data melalui teknik kredibilitas dan *dependabilitas*. Kredibilitas dicapai melalui triangulasi data, *member check* dan keterlibatan peneliti secara mendalam. *Dependabilitas* diuji dengan jejak audit dan dokumentasi proses penelitian secara rinci. Selanjutnya Peneliti melakukan analisis data berdasarkan pendapat (Miles & Huberman, 1994) dengan jenis analisis interaktif yang terdiri dari: Proses pengumpulan data, kondensasi dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan pendanaan

a. Permasalahan pendanaan yang terjadi pada PKBM Kalimantan Barat

Hasil penelitian menunjukkan permasalahan pendanaan yang terjadi pada PKBM Kalimantan Barat meliputi: 1) Keterbatasan dana pemerintah, meskipun

pemerintah telah berupaya untuk mengalokasikan dana untuk pendidikan namun di lapangan dana ini masih belum mampu menunjang pendidikan yang bermutu (Nurhadi, 2013), 2) Pergantian kepemimpinan dan kebijakan, Hal ini juga disampaikan oleh (W. P, 2013) bahwa kebijakan pemerintah dapat terjadi jika terjadi perubahan baik populasi, kenaikan harga, ataupun meningkatkan populasi putus sekolah, 3) Hubungan yang kurang baik dengan pemerintah kabupaten, hubungan yang kurang baik ini terjadi karna komunikasi belum baik. Komunikasi menjadi hal penting dalam membangun pendidikan (Simamora et al., 2024) terutama untuk kemajuan pendidikan pada pihak yang memberikan bantuan dana 4) Sulitnya mengetahui persyaratan administrasi bantuan dana dari pemerintah, Administrasi dalam pembiayaan merupakan bagian dari manajemen pembiayaan agar dana yang digunakan efektif dan efisien (Muhajirin, 2012) namun jika administrasi terlalu menyulitkan tentunya membuat pengelola juga enggan untuk mengupayakan dana bantuan.

b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pendanaan Pada PKBM Kalimantan Barat

Hasil Penelitian menunjukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan PKBM untuk mengatasi permasalahan pendanaan sebelumnya adalah meliputi: 1) Mengupayakan dana luar (baik kemitraan/kerja sama, pemerintah pusat, lembaga keuangan maupun donatur alumni), adanya bantuan dari dana pemerintah maka dapat mendukung kegiatan pembiayaan pendidikan (Yulianingsih et al., 2023), 2) Pengelola memberikan dana hibah untuk lembaga, Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan (Nurhadi, 2013) bahwa menghibahkan tanah, atau dana untuk lembaga pendidikan merupakan salah upaya pendanaan pendidikan yang dapat diupayakan dari masyarakat. 3) Melakukan upaya inovatif (*door to door*), memaksimalkan pemberdayaan, subsidi silang. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan (Klen, 2016) bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan

untuk menumpukan dan mempertahankan donatur yakni melalui strategi *door to door*, 4) Membangun usaha (Hidroponik, Konveksi Jahit), hal ini selaras dengan yang disampaikan (Nurhadi, 2013) bahwa pengalihan dana dari masyarakat melalui usaha dapat dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan.

2. Pengelolaan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat.

a. Alokasi pengembangan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengelolaan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat, pengelola PKBM melakukan penentuan prioritas dalam pengalokasian dana masyarakat. Penentuan prioritas ini bergantung dengan kebutuhan dari lembaga atau sekolah. Salah satu kunci kesuksesan dalam pengelolaan pendanaan yakni mengacu pada pengaturan kebutuhan dan skala prioritas (Mujayroh & Rohmat, 2020). Umami (2023) juga menyampaikan bahwa sebagai upaya pengelolaan pendanaan agar afektif dan efisien, pengelola perlu memperhatikan skala prioritas dari kesediaan dana yang dimiliki. Adapun prioritas yang menerima alokasi dana masyarakat terdiri dari: kebutuhan pendidikan, kelompok rentan, infrastruktur dan fasilitas, kualitas pengajar serta program inovatif.

Pada pengalokasian kebutuhan pendidikan di PKBM Kalimantan Barat fokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, program pemberdayaan serta pemenuhan program pendanaan masyarakat seperti konveksi, hidroponik, maupun KUM. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan (Adriansyah & Maftuhah, 2023) bahwa pengalokasian dana pendidikan dapat diperuntukkan untuk kegiatan belajar mengajar, atau serta kegiatan yang menunjang pencapaian pendidikan.

Kemudian pada pengalokasian kelompok rentan di PKBM Kalimantan Barat yakni pada kelompok masyarakat putus sekolah, warga belajar dan masyarakat buta aksara, warga belajar miskin, serta warga belajar dilembaga. Hal ini selaras dengan

teori yang disampaikan (Humaedi et al., 2020) bahwa Kelompok rentan tersebut antara lain yaitu anak-anak, orang lanjut usia, penyandang cacat, wanita hamil, dan fakir miskin. Setiap masyarakat berhak mendapatkan bantuan penerimaan dana termasuk dalam kelompok rentan. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan Sohrar (2021) bahwa orang miskin termasuk yang berhak mendapatkan bantuan dana. Hal ini disebabkan karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih termasuk kelompok masyarakat yang rentan karena banyak dari mereka tidak mendapatkan akses pendidikan (Humaedi et al., 2020).

Pada pengalokasian infrastruktur dan fasilitas di PKBM Kalimantan Barat fokus pada pemenuhan kebutuhan program pendanaan yang akan dilaksanakan, sementara pada pemenuhan kebutuhan pendidikan sifatnya melengkapi karena terbatas. Namun pemenuhan program pendanaan program masyarakat juga termasuk dalam mendukung fasilitas program pendidikan yang berlangsung. Kondisi ini sesuai dengan teori yang disampaikan Maftuhah (2023) bahwa pengalokasian dana pendidikan di lembaga dapat digunakan untuk memelihara sarana dan prasarana.

Selanjutnya pengalokasian pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat juga fokus pada kualitas pengajar. Pemenuhan kualitas pengajar berhubungan dengan kebutuhan dari pengajar. Pada PKBM Kalimantan Barat mengalokasikan pada aktivitas pelatihan tutor, dan kegiatan kumpul bersama tutor guna membangun kedekatan hubungan. Kebutuhan ini merupakan pembiayaan personalia pendidikan. Hal ini juga disampaikan teori Maftuhah (2023) bahwa biaya personalia yakni berhubungan dengan gaji guru, tunjangan guru dan kemaslahatan tutor atau pengajar ataupun tunjangan kehormatan. Kualitas pengajar berkaitan dengan alokasi sumber daya manusia.

Pengalokasian pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan juga diprioritaskan untuk

program-program inovatif. Inovasi ini dibutuhkan dalam rangka memprioritaskan kebijakan dan menjaga keseimbangan anggaran (Wijaya, 2022). Keterbatasan dana pemerintah membuat PKBM tidak bisa sepenuhnya membiayai program di luar program yang ditetapkan pemerintah. PKBM di Kalimantan Barat memprioritaskan dana untuk program inovatif berupa program usaha masyarakat, kerajinan, aktivitas usaha KUM, memasak, pemberdayaan, lomba-lomba, dan pensi. Hal tersebut selaras dengan teori (Abas et al., 2022) yakni inovasi program dalam pendidikan yang dapat dilakukan seperti peringatan hari-hari besar, perlombaan, keterampilan, produksi karya, bengkel maupun program keagamaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pada pengelolaan pendanaan masyarakat PKBM di Kalimantan barat, pengelola melakukan penganggaran dalam pengalokasian dana masyarakat. Pada pengelolaan pendanaan, pengelola melakukan penyusunan rencana anggaran. Penyusunan anggaran berfungsi sebagai pengambilan keputusan mengingat banyaknya keinginan dan kebutuhan dalam masyarakat (Wijaya, 2022). Dalam penyusunan rencana anggaran ini sebaiknya pengelola maupun kepala lembaga, maupun tutor merinci semua anggaran yang akan dikeluarkan (Muhajirin, 2012). Adapun penganggaran ini terdiri dari: penentuan kebutuhan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi.

Pada aktivitas penganggaran pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat, pengelola melakukan penentuan kebutuhan. Penentuan kebutuhan dalam penganggaran yakni disesuaikan dengan jenis kegiatan pendanaan yang dilaksanakan. Misalnya pada kegiatan KUM, sesuai dengan kebutuhan alat barang atau bahan yang sesuai. Kondisi ini juga berlaku pada kegiatan hidroponik, konveksi maupun pemberdayaan. Kebutuhan meliputi, fasilitas, pemesan, lokasi/lahan, bahan, alat serta kebutuhan yang lain. Segala kebutuhan yang diperlukan memberikan gambaran

dana yang akan dikeluarkan untuk kegiatan pengembangan. Hal ini sesuai dengan teori (Masditou, 2017) yakni pada dasarnya penganggaran dilakukan sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada pelaksanaan kegiatan, salah diantaranya berfungsi sebagai memperkirakan pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan dalam merealisasikan kegiatan dilembaga

Pada aktivitas penganggaran pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat, pengelola melakukan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran pendidikan menjadi salah satu langkah dan upaya penting dalam proses penganggaran (Masditou, 2017). Menyusun anggaran berdasarkan format pemerintah dan penyusunan ini berkaitan dengan pencatatan dana yang masuk dan dana yang keluar. Hal ini selaras dengan teori (Halimah & Nuriyah, 2023) bahwa dalam penganggaran terdapat 2 bagian, yaitu pengeluaran dan pendapatan yang masuk.

Selanjutnya pengelola di PKBM Kalimantan barat juga melakukan evaluasi dalam penganggaran pendanaan. Evaluasi dilakukan melalui proses perbandingan, pengumpulan serta analisis yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan sebuah program (Panjaitan & D. Naibaho, 2023). Evaluasi yang terjadi meliputi pengecekan bahan dan anggaran apakah harganya sesuai, bahan yang dijahit (konveksi), evaluasi ataupun monitoring ini melalui pengecekan dari catatan dana yang masuk/keluar dan evaluasi dan monitoring dilakukan saat panitia menggunakan dana tersebut, wajib ada laporan dana kegiatan. Hal ini juga sesuai dengan teori (Masditou, 2017) tentang evaluasi, evaluasi serta pengawasan menjadi tahap akhir dalam penganggaran ini meliputi proses pembelian, pemasukan, pengeluaran, keputusan pengeluaran serta pembukuan anggaran yang keluar dan masuk.

b. Mekanisme Penerimaan/penyampaian dana masyarakat di PKBM Kalimantan Barat

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pengelolaan pendanaan masyarakat di

PKBM Kalimantan Barat, pengelola melakukan perencanaan dalam penerimaan/mekanisme penyampaian dana. Hal ini disampaikan dalam teori (Mujayaroh & Rohmat, 2020) yang menjelaskan bahwa proses perencanaan menjadi salah satu tahap dalam pengelolaan dana pendidikan. Adapun perencanaan ini terdiri dari: penentuan tujuan penerima dana, identifikasi sumber dana, dan komunikasi.

Pada proses perencanaan penerimaan dana, pengelola PKBM di Kalimantan barat melakukan penentuan tujuan penerimaan dana. Hal ini juga disampaikan oleh (Rahmat, 2018) bahwa penentuan dan identifikasi tujuan menjadi salah satu fase dalam penyusunan pendanaan. Penentuan tujuan penerima yakni meliputi penyampaian tujuan dana bantuan, kesediaan masyarakat untuk menerima program atau dana yang akan diberikan, bentuk dukungan usaha kepada masyarakat, tujuan untuk menghasilkan SDM yang mandiri bertanggung jawab dan siap bekerja dimasyarakat. Penerimaan ataupun penolakan yang menjadi respons dari masyarakat dapat menjadi faktor utama dari terlaksananya sebuah program (Latuconsina et al., 2019) sehingga kondisi ini perlu menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Penyampaian tujuan ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum memberikan bantuan dana masyarakat guna tercapainya tujuan adanya pendanaan masyarakat.

Selanjutnya pengelola melakukan identifikasi sumber dana. Dalam pengelolaan dana pendidikan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan identifikasi, pengelompokan dan memperkirakan sumber dana yang dapat dikembangkan ataupun di gali (Umami, 2023). Hasil proses identifikasi yang dilakukan di PKBM Kalimantan Barat yakni: 1) Sumber dana pemerintah, hal ini dikarenakan sebelumnya PKBM telah lolos seleksi dana bantuan dari pemerintah, 2) Dana iuran pengelola, 3) Pemerintah desa, hal ini berkaitan dengan kerja sama dengan desa seperti menjadi pembicara, 3) Dana

pemberdayaan melalui dana BOP pemerintah. Hal ini juga selaras dengan teori Maftuhah (2023) menjelaskan bahwa sumber-sumber pendanaan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat.

Pada perencanaan penerimaan dana masyarakat, pengelola di PKBM Kalimantan Barat melakukan komunikasi. Komunikasi yang terjadi di PKBM bersifat langsung, terbuka. Komunikasi ini juga terjadi dengan melibatkan berbagai pihak baik pengelola internal, tutor, masyarakat yang terlibat, peserta didik, pelanggan mitra maupun pemerintah/dinas setempat. Hal ini juga selaras dengan teori (Muhajirin, 2012) yang menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk menarik masyarakat dalam berperan dalam pembiayaan pendidikan melalui komunikasi yang intensif. Pihak-pihak yang terlibat tersebut memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil dalam mendukung pembiayaan pendidikan.

Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukan bahwa pada pengelolaan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat melakukan pelaksanaan dalam penerimaan/mekanisme penyampaian dana. Pelaksanaan ini menjadi salah satu tahap dalam pengelolaan dana pendidikan (Mujayaroh & Rohmat, 2020). Dalam penerimaan dana dapat diperuntukkan untuk penerimaan umum, ataupun penerimaan khusus yang diperuntukkan untuk pendidikan, iuran lembaga atau sekolah, ataupun sumbangan dari masyarakat (Tasrif et al., 2023). Adapun pelaksanaan ini terdiri dari: keterlibatan masyarakat, perlindungan data, dan penghargaan.

Pada pelaksanaan penerimaan dana, pengelola PKBM di Kalimantan Barat melibatkan masyarakat. Keterlibatan yang terjadi yakni: 1) Keterlibatan sebagai karyawan usaha pengembangan, 2) Keterlibatan dalam upaya promosi usaha atau program, 3) Keterlibatan ide-ide, 4) Keterlibatan warga belajar dalam memberikan ilmu dan pengalaman kepada warga belajar yang lain (tutor sebaya) 5)

Keterlibatan warga belajar dalam pemberdayaan. Masyarakat memiliki peran serta tanggung jawab dalam pendanaan pendidikan, baik melalui inisiatif, ataupun partisipasi aktif. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan (Julaeha & Pitriani, 2023) yaitu melalui partisipasi masyarakat dapat mengorganisir kegiatan penggalangan dana, berkontribusi dalam upaya pengumpulan dana, ataupun menjadi sumber daya dan fasilitator kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya pengelola PKBM di Kalimantan Barat melakukan perlindungan data dalam penerimaan dana. Perlindungan data di PKBM Kalimantan Barat yang dilakukan oleh pengelola yakni dengan tidak memberikan data dengan sembarangan orang, memastikan kepada pihak yang bersangkutan sebelum memberikan data serta melindungi data melalui dapodik. Hal ini juga selaras dengan teori (Anggreini et al., 2022) Pengelolaan perlindungan data juga dilakukan oleh pemerintah melalui dapodik guna mempermudah proses pemantauan dan implementasi program di lembaga.

Pengelola PKBM di Kalimantan Barat juga melakukan penghargaan dalam penerimaan dana. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan di PKBM Kalimantan Barat yakni mengadakan acara bersama tutor seperti makan bersama, atau kumpul bersama. Selain itu penghargaan lainnya diberikan kepada peserta didik yang terlibat dalam program pemberdayaan yakni pujian dan sertifikat hasil dari pemberdayaan. Penghargaan menjadi hal penting dalam sebuah aktivitas program termasuk untuk pelaksanaan penerimaan dana maupun pemberi donatur. Melalui penghargaan akan memberikan kepercayaan dan motivasi untuk saling membutuhkan sehingga kegiatan atau rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar dan maksimal (mangkunegara, 2022).

Penelitian ini menemukan menunjukan bahwa pada pengelolaan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat melakukan evaluasi dan monitoring

dalam penerimaan/ mekanisme penyampaian dana. Adapun evaluasi ini menjadi salah satu tahap dalam pengelolaan dana pendidikan yang bertujuan untuk memastikan apakah dana telah digunakan dengan tepat (Mujayaroh & Rohmat, 2020) Adapun evaluasi dan monitoring ini terdiri dari: pendataan dan pencatatan, penilaian kinerja, evaluasi masukan masyarakat, identifikasi perbaikan identifikasi peluang.

Pengelola di PKBM Kalimantan Barat melakukan pendataan ataupun pencatatan dalam evaluasi dan monitoring. Aktivitas pencatatan ini menjadi salah satu bagian dari pengelolaan pendanaan (Mujayaroh & Rohmat, 2020). Pendataan ataupun pencatatan ini meliputi, pencatatan RAP, pencatatan dan masuk dan keluar. Pencatatan ini dilakukan ketika hendak dilaporkan ataupun ketika ada pesanan, baik bersifat bulanan maupun harian. Pencatatan dapat membantu pemiliknya untuk melihat bagaimana kondisi keuangan serta dapat melihat apakah ada perlu pengeluaran yang dikurangi atau dapat menambah tabungan (Khairullah, 2019).

Selanjutnya Pengelola di PKBM Kalimantan Barat melakukan penilaian kinerja dalam evaluasi dan monitoring. Penilaian kinerja hanya sebagai evaluasi namun juga memberikan motivasi kepada karyawan yang di dalamnya dapat mengukur keberhasilan karyawan memenuhi standar keuangan, dapat mengukur apakah mencapai target dan dapat mengukur bagaimana kinerja dulu dan sekarang (Herawati, 2020). Bentuk penilaian kinerja yang dilakukan di PKBM Kalimantan Barat yaitu 1) Kehadiran peserta program atau masyarakat, 2) Peningkatan hasil usaha/program (hasil dana), 3) Produk dan hasil dari program. Ketiga kondisi tersebut bertujuan untuk memberikan evaluasi, standar kinerja yang harus dipenuhi.

Pengelola di PKBM Kalimantan Barat melakukan evaluasi masukan masyarakat dalam evaluasi dan monitoring. Adapun evaluasi masukan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat yaitu evaluasi bagaimana keinginan atau harapan terhadap program

selanjutnya. Evaluasi masukan masyarakat juga berkaitan dengan kepuasan masyarakat dalam program misalnya pesanan apakah sesuai model, warna ukuran atau hasilnya sesuai keinginan pelanggan. Kondisi ini selaras dengan teori (Hakim, 2022) yang menjelaskan bahwa pendanaan masyarakat umumnya melibatkan masyarakat, karna pendanaan masyarakat juga bersumber dari masyarakat maka masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Evaluasi masukan dapat membantu pengelola dalam mengatur keputusan, alternatif yang dapat dipilih, rencana dan strategi ke depan, prosedur dalam mencapai serta menentukan sumber dana yang dapat dimaksimalkan (Hakim, 2022).

Kemudian, pengelola di PKBM Kalimantan Barat melakukan identifikasi perbaikan dalam evaluasi dan monitoring. Identifikasi perbaikan yang dilakukan ini meliputi 1) Memaksimalkan dana iuran jika ada kekurangan dana, 2) Kepercayaan dalam memilih karyawan usaha pengembangan, 3) Perbaikan pada sarana dan prasarana yang mendukung program pengembangan pendanaan. Ketika identifikasi yang dilakukan menggambarkan bahwa perbaikan terus temukan dan dilakukan agar mendukung tercapainya tujuan program pengembangan. Hal ini juga selaras dengan teori yang disampaikan (Andriani et al., 2022) yang menjelaskan bahwa di perlukan perbaikan pengelolaan pembiayaan dari semua pihak agar tujuan pembiayaan pendidikan di sebuah lembaga dapat tercapai.

Pengelola di PKBM Kalimantan Barat melakukan identifikasi peluang dalam evaluasi dan monitoring. Adapun identifikasi peluang yang dilakukan di PKBM Kalimantan barat yaitu 1) Identifikasi pada program pemerintah yang memberikan bantuan dana program pengembangan, 2) Identifikasi peluang saat lembaga mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah dalam upaya promosi, 3) Identifikasi kebutuhan lapangan pekerjaan sehingga program nantinya sesuai dengan kebutuhan

lapangan. Melalui identifikasi peluang yang dilakukan lembaga maka lembaga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada ataupun menyusun strategi untuk mendapatkan peluang tersebut. Hal ini juga disampaikan dalam teori (Perdianto et al., n.d.) bahwa ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan kesempatan atau tambahan anggaran yang mendukung program pendidikan dan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa pada pengelolaan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat melakukan pelaporan dalam penerimaan/mekanisme penyampaian dana. Pada pengelolaan pendanaan pendidikan harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan baik dari masyarakat, orang tua murid, usaha mandiri ataupun lainnya (Muhajirin, 2012). Adapun pelaporan ini terdiri dari: pelaporan keuangan dan rekomendasi masa depan.

Pengelola di PKBM Kalimantan Barat melakukan pelaporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang dilakukan yaitu: laporan keuangan program pemerintah (bersifat sementara), laporan keuangan pemerintah (berkelanjutan), laporan keuangan kegiatan di PKBM (sumbangan dana pengembangan), pencatatan dan masuk dan keluar pada program. Hal ini selaras dengan yang disampaikan dalam teori (Fikriya, 2021) bahwa bentuk laporan keuangan pendidikan yakni bentuk laporan catatan kas, ataupun catatan keuangan.

Pengelola di PKBM Kalimantan Barat melakukan rekomendasi masa depan dalam pelaporan. Pelaporan akan memberikan informasi penting dalam keuangan yang dapat digunakan untuk menilai prestasi lembaga ataupun perusahaan. Hasil dari pelaporan tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dimasa depan (Herawati,2020) . Salah satunya adalah rekomendasi masa depan. Rekomendasi masa depan di PKBM Kalimantan Barat ini meliputi:1) Harapan pengelola agar masyarakat terus meningkatkan usaha, 2) Pemasaran produk

semakin berkembang, 3) Ketersediaan sarana dan prasarana mendukung program pengembangan.

3. Manfaat pengelolaan pengembangan dana masyarakat di PKBM Kalimantan Barat

Adanya pengelolaan memberikan manfaat kepada peserta didik, masyarakat dan PKBM Kalimantan barat, baik di bidang sosial, ekonomi maupun pendidikan. Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan Sohrar (2021) bahwa pengelolaan pendanaan bantuan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama meringankan masyarakat dari kemiskinan (ekonomi), kesenjangan sosial (sosial) serta mendapatkan pendidikan yang layak (pendidikan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengelolaan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat memberikan manfaat dibidang sosial. Adapun manfaat di bidang sosial ini terdiri dari: 1) Memperkuat hubungan komunitas, hal ini disebabkan karna keterlibatan PKBM dalam aktivitas dimasyarakat seperti 17 Agustus, ataupun menyumbang dana kegiatan dimasyarakat. Hubungan yang kuat ini tergambar dari keterimaan dan antusias masyarakat terhadap program yang dihadirkan, masyarakat yang memilih PKBM untuk menyekolahkan anak mereka serta membuat masyarakat berpihak dan membela PKBM ketika ada lembaga atau pihak yang menjelekkkan PKBM, 2) Memberikan kesadaran sosial terhadap isu, masyarakat menyadari bahwa adanya kegiatan pengembangan ini dapat menambah penghasilan, pekerjaan dan membentuk karakter moral melalui aktivitas pemberdayaan yang berlangsung, 3) Membangun hubungan yang positif, hubungan positif terjadi baik antar pengelola, masyarakat, karyawan pengembangan, maupun peserta didik, pemerintah serta lembaga-lembaga yang mendukung pengelolaan pengembangan pendanaan. Secara umum adanya pengelolaan pengembangan pendanaan

masyarakat akan melibatkan partisipasi masyarakat, kondisi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat salah satunya dapat meningkatkan jaringan sosial maupun dapat meningkatkan dukungan sosial sesama (Triwiyanto et al., 2023).

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengelolaan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan barat memberikan manfaat di bidang ekonomi. Adapun manfaat dibidang ekonomi yakni: 1) Mendukung UMKM, adanya pengembangan pendanaan dapat mendukung UMKM karna membuka usaha yang baik hidroponik, konveksi, KUM maupun rumah makan di PKBM Kalimantan Barat, 2) Membuka Lapangan Pekerjaan, adanya usaha pengembangan pendanaan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat maupun peserta didik di PKBM. Selain itu juga mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja, karna salah satu pengembangan fokus pada mengembangkan SDM. Secara umum adanya pengelolaan pengembangan pendanaan masyarakat akan melibatkan partisipasi masyarakat, kondisi ini memberikan peluang untuk masyarakat menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik (Triwiyanto et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengelolaan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan barat memberikan manfaat di bidang pendidikan. Adapun manfaat di bidang pendidikan ini terdiri dari: 1) Menjaga keberlangsungan PKBM, hal ini karna usaha pengembangan dapat menopang kebutuhan pendidikan serta melalui program usaha pendanaan juga pengelola mengajak masyarakat untuk menempuh pendidikan di PKBM, 2) Peningkatan pengetahuan dan literasi, peningkatan pengetahuan terjadi pada masyarakat maupun peserta didik karna terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan literasi juga terjadi pada program pendanaan misalnya pemberdayaan, hidroponik dan konveksi.

Pada setiap usaha memberikan pengetahuan kepada masyarakat misalnya kemampuan memasak, keterampilan merawat taman, ataupun kemampuan menjahit, dll. 3) Memberikan pendidikan untuk semua masyarakat, melalui pengelolaan pendanaan masyarakat ini dapat memberikan pendidikan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan dana dan memberikan kesempatan ataupun kebebasan kepada warga belajar untuk memilih pengetahuan atau keterampilan yang ingin dikuasai, 3) Peningkatan program PNF yang relevan dan beragam, peningkatan program di PKBM Kalimantan Barat misal peningkatan program KUM, pembuatan sabun, merangkai bunga, pembersih, wifi, pensi, bimbel mewarnai, bimbel menggambar, peningkatan program pemberdayaan yang semakin beragam yang dahulu hanya komputer sekarang sudah ada tata boga, pengelasan, menanam ataupun servis dll. Pada dasarnya adanya pengelolaan pengembangan pendanaan pendidikan ini akan melibatkan peran dari masyarakat, adanya peningkatan partisipasi masyarakat memberikan dampak pendidikan. Hal ini juga disampaikan bahwa adanya partisipasi masyarakat dapat membantu masyarakat untuk mempelajari pengetahuan ataupun keterampilan baru (Triwiyanto et al., 2023).

4. Strategi Pengembangan pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat

a. Pengembangan TIK dalam pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pendanaan masyarakat yang digunakan PKBM Kalimantan yakni pengembangan TIK. Teknologi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan masyarakat termasuk pada pengembangan manajemen pendidikan dan teknologi juga membaca dampak pada dunia pendidikan (Suradji, 2018) dan dapat dimaksimalkan sebagai strategi pengelolaan pendanaan (keuangan). Kondisi ini bisa menjadi peluang untuk pemanfaatan TIK dapat memberikan kemudahan banyak pihak dalam strategi pengembangan. Pengembangan TIK ini

meliputi: pemanfaatan media sosial dan internet banking.

Pemanfaatan media sosial yang terjadi di PKBM Kalimantan Barat fokus pada upaya promosi usaha atau pengembangan pendanaan masyarakat. Sosial media yang digunakan di PKBM Kalimantan barat mencakup semua aplikasi sosial media yaitu: Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Whatapps, maupun Youtube. Adapun yang ditampilkan di sosial media tersebut adalah produk-produk usaha, ataupun aktivitas kegiatan pengembangan usaha dan pemberdayaan. Hal ini juga selaras dengan teori yang disampaikan (Widayati & Augustinah, 2019) bahwa media sosial seperti Youtube, Facebook, blog, Twitter atau lainnya tidak hanya digunakan sebagai media untuk bertukar informasi namun juga dapat dimaksimalkan sebagai pemasaran produk dan berbisnis dengan berbagai foto ataupun video.

Pemanfaatan selanjutnya adalah internet banking. Adapun di PKBM Kalimantan Barat menggunakan aplikasi internet banking untuk memudahkan proses pembayaran ataupun pelunasan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ataupun usaha pengembangan yang dilakukan. Melalui internet banking maka nasabah dapat melakukan transaksi cukup dengan menggunakan internet tanpa harus antre ke ATM ataupun BANK (Hendarsyah, 2012).

b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat

Hasil Penelitian menunjukkan strategi pendanaan masyarakat yang digunakan PKBM Kalimantan Barat melalui pengembangan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan Normina (2016) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dari masyarakat maupun perseorangan secara sukarela dan sadar untuk program pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi. Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan pendanaan masyarakat.

Strategi pengembangan di PKBM

Kalimantan Barat yakni melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan pendanaan masyarakat. Perencanaan ini terdiri dari beberapa tahapan analisis, yaitu analisis permasalahan, analisis potensi yang dimiliki dan bagaimana analisis kepentingan masyarakat juga dilaksanakan (Wijayanti, 2019). Pada analisis permasalahan, masyarakat ikut serta dalam melakukan analisis permasalahan terutama pada program yang akan dilaksanakan, misalnya hidroponik. Analisis yang dilakukan berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi seperti apakah bisa menanam di air, apakah produk akan laku, kemampuan yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya analisis potensi yang dilakukan yakni berdiskusi terkait peluang yang masyarakat miliki berdasarkan kemampuan mereka, peluang pasar serta pertukaran ide antara pengelola dan masyarakat dalam pengembangan usaha. Kemudian masyarakat juga melakukan analisis kepentingan, analisis kepentingan yang dilakukan yakni penetapan program, kesediaan masyarakat untuk ikut serta, diskusi berkelanjutan antara pengelola dan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori (Y. Hermawan & Suryono, 2016) bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat pada perencanaan yakni masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan, penolakan, hadir dan melakukan identifikasi.

Strategi pengembangan di PKBM Kalimantan Barat yakni melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pendanaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan, yakni pada proses ini terdiri dari pergerakan sumber daya dana, koordinasi/administrasi dan penjabaran program (Wijayanti, 2019). Pergerakan sumber daya yang dilakukan masyarakat tidak bersifat materiil namun non materiil seperti sukarelawan, tenaga, kesediaan tempat ataupun alat-alat yang mendukung program pengembangan. Adapun yang bersifat materiil yakni pemanfaatan sisa bahan konveksi yang hasilnya diberikan untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga melakukan koordinasi, baik kepada mitra, maupun pengelola. Koordinasi berkaitan dengan kebutuhan

program yang akan dilakukan, data pesanan, jumlah model warna maupun pesanan yang lainnya. Selanjutnya secara administrasi masyarakat melakukan pencacaran pribadi terkait program pengembangan baik pesanan, kebutuhan maupun pencatatan dana yang dihasilkan. Kemudian masyarakat juga melakukan penjabaran program, baik sifatnya spontan maupun sifatnya promosi terutama di *media sosial* WA, Facebook, maupun grup-grup lainnya. Pada pelaksanaan ini juga cenderung terjadi pertemuan dan pelibatan masyarakat dalam program. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan juga sesuai dengan teori (Y. Hermawan & Suryono, 2016) yakni mempersiapkan program yang akan dilaksanakan, sarana prasarana, alat dan kebutuhan program yang akan berlangsung.

Strategi pengembangan di PKBM Kalimantan Barat yakni melalui partisipasi masyarakat dalam evaluasi pengelolaan pendanaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan, pada proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang awal atau justru terjadi penyimpangan (Wijayanti, 2019). Partisipasi dalam evaluasi ini terdiri dari pengawasan, penetapan standar dan pengukuran keterlibatan. Pada pengawasan masyarakat melakukan pengawasan terhadap program yang dilakukan misalnya pengawasan progres program atau perkembangan dari program, hal ini berkaitan dengan segala kebutuhan program contohnya pada hidroponik masyarakat mengawasi pertumbuhan tanaman, antisipasi hama ataupun pada program yang lain pengawasan terhadap kebutuhan bahan jika telah habis. Selanjutnya penetapan standar, yakni masyarakat melakukan penetapan harga, kehadiran, kualitas produk, setiap pemberdayaan memiliki standar minimal hasil program. Selanjutnya adakah pengukuran keterlibatan, pengukuran ini secara tidak langsung dilakukan karna program atau usaha pengembangan menjadi pekerjaan utama dari masyarakat sementara pengukuran juga dilakukan melalui kehadiran masyarakat dalam program pemberdayaan. Kehadiran atau presensi ini secara tidak langsung membuat

masyarakat melakukan pengukuran keterlibatan. Pada aktivitas evaluasi yang dilakukan masyarakat di atas menggambarkan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan apakah tujuan telah tercapai serta melakukan evaluasi dengan memberikan tanggapan ataupun masukan (Tumbel, 2016)

c. Kerja sama atau kemitraan dalam pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pendanaan masyarakat yang digunakan PKBM Kalimantan Barat yakni kerja sama dan kemitraan. Kemitraan merupakan kesepakatan bersama untuk menanggung risiko dan keuangan sehingga dapat mencapai kepentingan bersama. Kerja sama atau mitra meliputi: pemerintah, Swasta, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, masyarakat dan kemitraan yang lainnya. Hal ini juga selaras dengan teori (Dwiyanto et al., 2021) menjelaskan bahwa kemitraan pendidikan yakni pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga organisasi pemerintah ataupun non, badan atau usaha untuk saling kerja sama untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan berdasarkan keputusan bersama (saling memberikan keuntungan, memperkuat dan saling memerlukan).

Pengelola PKBM di Kalimantan Barat menjalin kerja sama dengan pemerintah sebagai strategi pengembangan pendanaan masyarakat. Bentuk kerja sama pada pemerintah yaitu, dana bantuan KUM, dana bantuan PKW, kerasmu SDM dari lembaga PKBM. Untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah lembaga akan melakukan pengajuan proposal terlebih dahulu dan menjalin komunikasi bersama pihak pemerintah terkait kerja sama SDM. Hal ini juga selaras dengan teori yang disampaikan (Rizka & Hardiansyah, 2017) bahwa kerja sama dengan pemerintah dapat diupayakan dengan melakukan pengajuan proposal bantuan ke berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pengelola PKBM di Kalimantan Barat menjalin kemitraan dan kerja sama dengan swasta sebagai strategi pengembangan pendanaan masyarakat. Menjaln kemitraan

bersama swasta dapat mengatasi tantangan dalam pendanaan pendidikan (Maula et al., 2023). Bentuk kemitraan atau kerja sama pada swasta yaitu, bantuan dana CSR, sponsor kegiatan (roket chicken, teh botol), kerja sama SDM dari lembaga ke perusahaan atau industri.

Pengelola PKBM di Kalimantan Barat menjalin kemitraan dan kerja sama dengan lembaga keuangan sebagai strategi pengembangan pendanaan masyarakat. Bentuk dan kerja sama pada lembaga keuangan yaitu bantuan dan pinjaman dari BANK KUR. Hal ini selaras dengan teori Latief (2022) yang disampaikan bahwa kemitraan yang dapat terjalin dalam bentuk permodalan dalam pendanaan bisa dari koperasi simpan pinjam, maupun perbankan.

Pengelola PKBM di Kalimantan Barat menjalin kemitraan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagai strategi pengembangan pendanaan masyarakat. Bentuk kemitraan atau kerja sama yang terjadi di lembaga pendidikan yaitu, hadirnya pengelola sebagai pembicara pengelolaan usaha, lembaga pendidikan sebagai pelanggan usaha (konveksi). Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan Latief (2022) bahwa kemitraan bisa terjalin dengan pihak lain dalam rangka peningkatan keterampilan maupun pengetahuan, yakni dalam bentuk narasumber. Pihak lain banyak jenisnya salah satunya adalah lembaga pendidikan.

Pengelola PKBM di Kalimantan Barat menjalin kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat sebagai strategi pengembangan pendanaan masyarakat. Bentuk kemitraan atau kerja sama yang terjadi di masyarakat yakni pengupayaan dana melalui iuran dana/SPP peserta didik, iuran pengelola. Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan (Nurhadi, 2013) bahwa bentuk pendanaan dari masyarakat dapat berupa hibah tanah, membangun sekolah, membantu rehabilitasi, perlengkapan pendidikan, ataupun membantu dana untuk pendidikan.

Pengelola PKBM di Kalimantan Barat menjalin kemitraan dan kerja sama lainnya sebagai strategi pengembangan pendanaan masyarakat. Kemitraan ini dapat memajukan lembaga, berbagi keuntungan ataupun kerugian

(Tohani, 2022). Bentuk kerja sama dan kemitraan ini yaitu: kerja sama bersama pemerintah desa, rumah makan (pelanggan PKBM), PKK (sebagai pembicara), dinas pendidikan, kampus usia, usaha sablon, mitra bersama tutor melalui usaha konektor, mitra bordir, puskesmas (kerja sama SDM/Magang). Secara umum, kemitraan dan kerja sama lainnya terjadi pada pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. Kemitraan yang terjalin bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dilembaga. Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan (Maula et al., 2023) bahwa menjalin kemitraan bersama pemerintah, masyarakat dan organisasi-internasional dapat mengatasi tantangan dalam pembiayaan pendidikan.

d. Special Event dalam pendanaan masyarakat di PKBM Kalimantan Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pendanaan masyarakat yang digunakan PKBM Kalimantan yakni *special event*. *Special event* merupakan suatu program yang di selenggarakan dalam upaya promosi sebuah produk ataupun kegiatan dalam sebuah organisasi maupun lembaga agar pihak luar menjadi tertarik dan berminat untuk berpartisipasi (Ruslan, 2007) serta Meningkatkan citra positif sebuah lembaga (Rhamadhitya, 2010). Kegiatan pengumpulan dana dapat dilakukan dengan strategi pelaksanaan *special event* (Bariyah, 2016). Hal ini juga selaras dengan teori Kim (2016) bahwa dalam pengembangan pendanaan baik menemukan donatur maupun mempertahankan donatur melalui *special event*. PKBM Kalimantan Barat menggunakan *special event* sebagai strategi yaitu event kegiatan agama seperti lomba-lomba azan sholat, kegiatan PKBM yang mengundang alumni serta mengenalkan program pemberdayaan seperti pensi atau kampung literasi.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) permasalahan pendanaan masyarakat yang terjadi pada PKBM Kalimantan Barat sebelumnya sangat beragam. Permasalahan

tersebut meliputi terbatasnya dana pemerintah, perubahan kebijakan dan pergantian kepemimpinan, hubungan yang kurang baik dengan pemerintah serta sulitnya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, PKBM telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan adalah yaitu: mengupayakan dana luar, pengelola memberikan dana hibah, melakukan upaya inovatif serta membangun usaha bersama masyarakat, 2) pengelolaan pendanaan masyarakat pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kalimantan Barat telah berjalan. Namun pada prioritas penerima dan pelaksanaan penerimaan dana masyarakat belum optimal. Selanjutnya, adanya pengelolaan pengembangan pendanaan masyarakat telah memberikan manfaat pada semua PKBM baik dibidang sosial, ekonomi dan pendidikan. 3) strategi pengelolaan pendanaan masyarakat hingga *survive* pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kalimantan Barat telah berjalan namun belum optimal. Strategi ini meliputi: pengembangan partisipasi masyarakat, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kerja sama dan kemitraan, *special event*. Pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi partisipasi masyarakat belum berjalan optimal. Kemudian, pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui aplikasi *fundraising* dan *internet banking* juga belum optimal. Selanjutnya, kerja sama dan kemitraan bersama pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A., Badu, S. Q., & Ngiu, Z. (2022). INOVASI KEPALA SEKOLAH DALAM PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)(STUDI MULTIKASUS DI SMA NEGERI 1 MARISA DAN SMK NEGERI 1 MARISA KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO). *Normalita (Jurnal Pendidikan)*, 10(3), 162–180.
- Adriansyah, H., & Maftuhah, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota

- Tangerang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1).
<https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i1.623>
- Andriani, N., Chotib, M., & Rahayu, N. W. I. (2022). Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru. *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 42–60.
- Anggreini, F. A. W., Damayanti, L. O., & Saptaningrum, I. D. (2022). Tantangan mewujudkan perlindungan data pribadi dalam tata kelola di sektor kesehatan dan pendidikan. *Yayasan TIFA*.
- Bariyah, N. O. N. (2016). STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA SOSIAL UMMAT PADA LEMBAGA-LEMBAGA FILLANTROFI DI INDONESIA (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
<https://doi.org/10.31332/lifalah.viii.472>
- Dwiyanto, A. R., Prabowo, E., & Nugraha, A. (2021). Panduan kemitraan penguat sarana pembejalan jarak jauh di masa kebiasaan baru. *Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengar Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*.
- Ekadharna, A., Darma, C., & Rukmana, E. (2017). DADA (DANA DARING) PELIBATAN NETIZEN DALAM PENDIDIKAN NONFORMAL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal AKRAB*, 8(1).
<https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v8i1.149>
- Fikriya, M. (2021). Urgensi Laporan Keuangan pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.
- Hakim, A. R. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di SMA o6 Maarif Bangsalsari Jember* [Skripsi, tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Halimah, N., & Nuriyah, A. (2023). Analisis Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1).
- Hendarsyah, D. (2012). Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(1).
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.viii.2>
- Hermawan, T., Fakhrudin, & Suminar, T. (2017). Pengelolaan Pembiayaan Menuju Kemandirian di PKBM Al Huda Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. *EM*, 6(2).
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1).
<https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.811>
- Hidayah, N., & Nusantara, W. (2020). Pengelolaan PKBM dalam Perspektif Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Lokal. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 4(2), 26–35.
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). KELOMPOK RENTAN DAN KEBUTUHANNYA (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Share: Social Work Journal*, 10(1).
<https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>
- Ibrahim, I., Saidang, S., & Suparman, S. (2020). Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Enrekang melalui Model Kemitraan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i2.715>
- Julaeha, S., & Pitriani, H. (2023). Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2).
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusan tara.vii2.199>
- Kamil, M. (2011). *Pendidikan Nonformal*. Alfabeta.

- Klen, K. (2016). Fundraising for social change. *Ohn Wley & Sons*.
- Latuconsina, O. C., Syaikat, Y., & Siregar, H. (2019). STRATEGI PEMBIAYAAN TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA AMBON. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24640
- mangkunegara. (2022). *manajemen sumber daya manusia perusahaan pt. remaja rosdakarya*.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI, Vol. 1 No.(2)*.
- Maula, I., Irwandi, Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 05(04).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. Sage publications. Thousand Oaks, CA.
- Muhajirin. (2012). PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERSUMBER DARI PARTISIPASI MASYARAKAT. *Educational Management*, 1(2).
- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/arfannur.viii.151>
- Mulyono. (2010). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Nurhadi, M. A. (2013). Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1).
- Nurkholis, & Cahyono, E. (2022). *Kajian costing dan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan*.
- Panjaitan, L. R., & D. Naibaho. (2023). Suatu Kegiatan Evaluasi Dalam Tindak Lanjut Hasil Penilaian Pembelajaran Siswa. *MERDEKA Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 239–246.
- Perdianto, R., Mariza Qadarsih, A., & Nurma Jaya Putra, A. (n.d.). PERAN AKTIF PEMUDA ERA GLOBALISASI DALAM PEMBANGUNAN DESA MUARA SEMERAH KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI. In *Maha* (Vol. 2, Issue 8).
- PRATIWI, R. (2022). PENGELOLAAN DANA KEUANGAN KELURAHAN DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI (TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH) OLEH. *PAREPARE*, 8.5.2017.
- Puspito, G. W., Swandari, T., & Rokhman, M. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(1). <https://doi.org/10.31538/cjotl.viii.88>
- Rahmat, A. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal*. Ideas Publishing.
- Rizka, M. A., & Hardiansyah, R. (2017). Analisis strategi fund raising dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ceria. *Journal of Nonformal Education*, 3(2), 158–163.
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen public relations dan manajemen komunikasi*. Grafindo Persada.
- Simamora, I. Y., Zahra, M., Sinaga, W. A., Pandiangan, H. E., & Hasibuan, S. F. (2024). Peran Komunikasi dalam Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2).
- Suhardan, D. H., & Ridwan, E. (2014). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Alfabeta.
- Suharta, R. B. (2003). Upaya pengembangan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 8(2), 81–96.
- Suradji, M. (2018). Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Bidang Kesiswaan, Kepegawaian Dan Keuangan Di

- Sma Muhammadiyah 1 Gresik. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.52166/talim.vii2.957>
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*. UR Press. Politeknik Ilmu Pemasarakatan.
- Tasrif, M. J., Supriadi, Y. N., Hafid, M., Setiawan, K., & Alfiyanto, A. (2023). Education Financing Management in Special Needs Schools. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 26–31.
- Tohani, E. (2010a). KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEBAGAI AGEN PENGEMBANGAN MASYARAKAT. *JIV*, 5(2). <https://doi.org/10.21009/jiv.0502.5>
- Tohani, E. (2010b). Pemetaan tingkat mutu pendidikan pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(1), 217866.
- Tohani, E. (2010c). Strategi Pengembangan Kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Sebagai Penyedia Layanan Bidang Pendidikan. In *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan UNY* (Vol. 3, Issue 2).
- Tohani, E. (2022). *Perencanaan Pendidikan Nonforma*. Uny Press.
- Triwiyanto, T., Nurabadi, A., Sumarsono, R. B., Kusumaningrum, D. E., Arafik, Muh., & Pramono. (2023). Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, dan Mutu Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jppp.v7i1.54509>
- W. P, F. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>
- Widayati, W., & Augustinah, F. (2019). PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROMOSI MAKANAN RINGAN KRIPIK SINGKONG DI KABUPATEN SAMPANG. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i2.345>
- Yulianingsih, W.-, Lestari, G. D., Soedjarwo, S., Atmaja, I. K., Susanto, S. F., & Lutviatiani, M.-. (2023). Assistance in the Management of Entrepreneurship-Based Nonformal Educational Institutions and Institutional Digital Marketing. *KOLOKIUUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 11(2). <https://doi.org/10.24036/kolokium.viii2.610>